



COMTE: Journal of Sociology Research and Education

Volume 3, Number 1, March, 2026, Page 15-40

e-ISSN: 3047-566X (Media Online)

Email: comtejsre@gmail.com

Website: <https://naluriedukasi.com/index.php/comtejsre/index>



COMTE: Journal of Sociology Research and Education is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Received February 13, 2026, Accepted March 20, 2026, Published March 31, 2026

Peran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam Menentukan Lanjut Usia Miskin Sebagai Penerima Bantuan Sosial di Kelurahan Rorotan

Indra Ambar Setianingsih¹, Romi Mesra²

¹Program Studi Sosiologi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka^{*}

²Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: ¹ambar10dewi@gmail.com, ²romimesra@unima.ac.id

Abstrak: Dalam studi mendalam ini, kami mengeksplorasi peran krusial Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai mekanisme utama dalam mengidentifikasi dan menentukan lansia miskin sebagai penerima bantuan sosial di desa perkotaan Rorotan, Jakarta Utara. DTSEN, yang dirancang sebagai sistem pengumpulan data terintegrasi oleh pemerintah, bertujuan untuk memastikan distribusi bantuan sosial yang lebih terarah, transparan, dan adil bagi semua lapisan masyarakat. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dipergaya dengan perspektif sosiologis, studi ini mengumpulkan data lapangan melalui serangkaian wawancara mendalam, pengamatan langsung di lapangan, dan penelitian arsip, melibatkan pejabat desa setempat, pekerja sosial profesional, dan lansia yang menjadi penerima manfaat. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi DTSEN telah membawa peningkatan signifikan dalam validitas dan akurasi penentuan penerima bantuan, dari 78 persen menjadi 93 persen. Sistem ini telah terbukti efektif dalam meminimalkan duplikasi data yang tidak diinginkan, memperbaiki kesalahan pencatatan yang sering terjadi, dan memperkuat sinergi koordinasi antara lembaga-lembaga terkait. Namun, di balik kesuksesan ini, tantangan nyata tetap ada: tingkat literasi digital yang tidak merata di kalangan petugas lapangan, proses pembaruan data yang kadang-kadang lambat, dan kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam tahap verifikasi. Dari perspektif teoretis, DTSEN tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat prinsip keadilan sosial dan mendorong hubungan yang lebih egaliter antara negara dan warganya. Untuk mengoptimalkan implementasi sistem ini di masa depan, studi ini mendorong langkah-langkah konkret seperti meningkatkan kapasitas institusional melalui pelatihan intensif, memperkuat kolaborasi antar lembaga, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra setara dalam proses pengambilan keputusan. Melalui narasi ini, kami berharap dapat

menginspirasi diskusi yang lebih luas tentang bagaimana teknologi dan kebijakan dapat bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih inklusif.

Kata Kunci : bantuan sosial, DTSEN, kebijakan publik, keadilan sosial, lansia miskin

Abstract: *In this in-depth study, we explore the crucial role of the National Socioeconomic Single Data (DTSEN) as the main mechanism for identifying and determining poor elderly people as recipients of social assistance in Rorotan Subdistrict, North Jakarta. Designed as an integrated data collection system by the government, DTSEN aims to ensure a more targeted, transparent, and fair distribution of social assistance for all levels of society. Using a qualitative descriptive approach informed by a sociological perspective, this study collected field data through a series of in-depth interviews, direct field observations, and archival document searches, involving local subdistrict officials, professional social workers, and elderly beneficiaries. The results of the study show that the implementation of DTSEN has significantly improved the validity and accuracy of beneficiary targeting, from 78 percent to 93 percent. This system has proven effective in minimizing unwanted data duplication, correcting frequent recording errors, and strengthening coordination synergies between relevant agencies. However, behind this success, real challenges remain: uneven levels of digital literacy among field officers, sometimes slow data updating processes, and a lack of active community involvement in the verification stage. From a theoretical perspective, DTSEN functions not only as an administrative tool, but also as a strategic instrument to reinforce the principle of social justice and foster a more egalitarian relationship between the state and its citizens. To optimize the implementation of this system in the future, this study encourages concrete steps such as increasing institutional capacity through intensive training, strengthening inter-agency collaboration, and encouraging active participation from the community as equal partners in the decision-making process. Through this narrative, we hope to inspire a broader discussion on how technology and policy can work together to achieve more inclusive social welfare.*

Keywords: *DTSEN, social assistance, public policy, social justice, poor elderly*

A. Pendahuluan

Kemiskinan bukanlah sekadar masalah ekonomi, melainkan fenomena sosial multidimensi yang dipengaruhi oleh konfigurasi budaya, hubungan sosial, dan arsitektur kebijakan publik yang saling terkait. Di Indonesia, berbagai upaya negara untuk mengurangi prevalensi kemiskinan diwujudkan melalui berbagai instrumen bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Di antara semua kelompok rentan yang menjadi sasaran intervensi, kelompok lanjut usia berada dalam posisi yang paling rentan. Selain tekanan ekonomi, kelompok ini menghadapi penurunan kemampuan fisik, jaringan sosial yang terbatas, dan kesulitan dalam mengakses layanan dasar serta kesempatan untuk mempertahankan kehidupan yang bermartabat (Badan Pusat Statistik, 2023).

Dalam upaya untuk meningkatkan akurasi distribusi bantuan sosial, pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Sosial, telah merancang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai tindak lanjut dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTSEN dikembangkan sebagai pusat data sosial-ekonomi yang menggabungkan informasi dari berbagai sumber sehingga proses penentuan penerima manfaat dapat lebih akurat, transparan, dan bebas dari redundansi data. Dengan demikian, DTSEN tidak hanya berfungsi sebagai repositori data, tetapi beroperasi sebagai alat strategis yang memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan program perlindungan sosial (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2024).

Integrasi data melalui DTSEN merupakan bagian dari agenda yang lebih besar untuk mengembangkan data nasional yang kredibel. Basis data tunggal ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pengelolaan kemiskinan, mencegah duplikasi penerima bantuan, dan memperkuat integrasi regulasi antar lembaga. Dalam kerangka kebijakan publik, langkah ini merupakan pilar fundamental untuk memastikan bahwa sumber daya negara dialokasikan secara efisien dan ditargetkan pada mereka yang paling membutuhkan (Bappenas, 2023).

Namun, implementasi pengumpulan data tentang lansia miskin di tingkat akar rumput masih menghadapi berbagai hambatan. Tidak jarang ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi

sosial-ekonomi nyata dan informasi yang tercantum dalam data. Penundaan pembaruan, ketidakkonsistenan data antar lembaga, dan mekanisme verifikasi berlapis sering menjadi penyebab ketidakakuratan. Akibatnya, sejumlah lansia yang memenuhi syarat tidak tercantum dalam data, sementara individu yang sudah tidak memenuhi syarat tetap menerima bantuan. Fenomena ini menegaskan bahwa keberadaan sistem data tunggal tidak menjamin akurasi tanpa didukung oleh praktik pengumpulan data yang cermat dan partisipasi masyarakat dalam proses verifikasi (Suryani & Pratama, 2022).

Transisi sistemik dari DTKS ke DTSEN telah menimbulkan masalah baru. Sistem pengumpulan data yang lebih komprehensif memerlukan integrasi antar lembaga, mekanisme pembaruan berkelanjutan, dan proses verifikasi yang lebih ketat. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai dan tenaga ahli yang kompeten, integrasi data berpotensi menghasilkan informasi yang tidak sesuai dengan dinamika sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, studi tentang peran DTSEN dalam menentukan lansia miskin di tingkat lokal sangat penting untuk memahami bagaimana sistem beroperasi dalam konteks sosial yang lebih detail dan realistis (Susanto, 2021).

Sejumlah studi sebelumnya telah membuktikan bahwa akurasi data merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program perlindungan sosial. Sebuah studi yang diterbitkan dalam *Social Welfare Review* menunjukkan bahwa akurasi DTKS masih bergantung pada verifikasi manual di tingkat desa atau kecamatan, sehingga rentan terhadap distorsi dan kesalahan oleh petugas lapangan (Prabowo & Setiawan, 2021). Studi lain dalam *Journal of Social Development* menekankan bahwa integrasi data dapat meningkatkan ketepatan program, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dan sistem pemantauan internal (Handayani, Kusuma, & Wibowo, 2022). Sementara itu, penelitian yang diterbitkan dalam *Indonesian Journal of Social Policy* menyatakan bahwa implementasi awal DTSEN di wilayah pilot berhasil mengurangi alokasi yang salah hingga 18%, meskipun menghadapi kendala dalam sinkronisasi data dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembaruan informasi (Rahmawati, 2023).

Meskipun studi-studi sebelumnya telah memberikan wawasan penting tentang dinamika pengumpulan data sosial, studi yang secara khusus mengkaji penggunaan DTSEN untuk mengidentifikasi lansia miskin di tingkat desa masih sangat terbatas. Sebagian besar studi berfokus pada analisis kebijakan tingkat makro atau mengevaluasi efektivitas sistem di tingkat nasional tanpa menyelami lebih dalam proses sosial yang terjadi di tingkat desa. Kesenjangan penelitian ini penting untuk diisi karena proses verifikasi dan penentuan penerima bantuan terjadi di ruang sosial yang paling dekat dengan komunitas. Oleh karena itu, melacak bagaimana DTSEN diimplementasikan dalam konteks lokal seperti di Kecamatan Rorotan, Jakarta Utara, dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor sosial yang mempengaruhi validitas dan akurasi pengumpulan data tentang lansia miskin (Dinas Sosial Provinsi Jakarta, 2024).

Keunikan studi ini terletak pada penggunaan perspektif sosiologis dalam menganalisis implementasi DTSEN. Alih-alih hanya memandang DTSEN sebagai alat administratif, studi ini menempatkannya sebagai produk dari hubungan antara negara dan warga dalam konteks pengelolaan kesejahteraan. Melalui pendekatan ini, studi ini meninjau dinamika koordinasi antara aktor, pola interaksi antara pejabat dan masyarakat selama proses pengumpulan data, serta peran partisipasi publik dalam memastikan validitas data.

Temuan awal dari observasi di Kecamatan Rorotan menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah lansia miskin yang tidak terakomodasi dalam DTSEN dan karenanya tidak menerima bantuan yang seharusnya mereka terima. Faktor-faktor yang berkontribusi meliputi dokumen identitas yang tidak lengkap, perubahan kondisi sosial-ekonomi yang tidak diikuti dengan pembaruan data, dan ketidakselarasan antara kecamatan dan lembaga layanan sosial. Situasi ini menyoroti kesenjangan antara kebijakan berbasis data dan realitas sosial yang dinamis. Oleh karena itu, studi ini menilai pentingnya mengevaluasi secara kritis efektivitas DTSEN dalam menjangkau dan mengidentifikasi lansia miskin secara lebih adil dan sesuai dengan konteks empiris di lapangan (Dinas Sosial Provinsi Jakarta, 2024).

B. Tinjauan Teoritis

1) Konsep Peran dalam Konteks Kebijakan Sosial dan Implementasinya pada DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional)

Dalam sosiologi klasik, konsep peran dipandang sebagai kumpulan ekspektasi, norma, dan konfigurasi tindakan yang melekat pada posisi sosial tertentu dalam struktur masyarakat. (Soekanto, 2017) menegaskan bahwa peran tidak dapat disederhanakan menjadi sekadar atribut yang mengikuti status, melainkan merupakan cerminan dari hubungan dinamis antara hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh individu dan lembaga sesuai dengan posisi yang mereka pegang. Dalam bidang kebijakan sosial, pemahaman tentang peran merupakan alat analitis penting untuk menilai kemampuan suatu institusi dalam melaksanakan mandatnya secara konsisten dan akuntabel.

Kerangka konseptual ini menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merealisasikan fungsinya. Dalam studi ini, peran didefinisikan sebagai kontribusi substantif DTSEN dalam mengorganisir proses identifikasi awal, verifikasi, dan penentuan penerima bantuan sosial bagi kelompok lansia miskin. Oleh karena itu, posisi DTSEN tidak hanya dipahami sebagai alat administratif untuk mengumpulkan data, tetapi sebagai instrumen strategis yang mengarahkan pengelolaan bantuan sosial agar lebih transparan, akuntabel, dan efektif.

2) Sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam Perspektif Sistem Informasi Sosial

DTSEN adalah mekanisme pengumpulan data terintegrasi yang dirancang oleh pemerintah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan memperbarui informasi sosio-ekonomi tentang seluruh populasi Indonesia. Secara konseptual, keberadaan DTSEN sejalan dengan teori sistem informasi sosial yang menekankan urgensi integrasi lintas sektor dalam mendukung formulasi kebijakan publik berbasis bukti. Basis data standar ini menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan sosial yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan administratif.

Menurut (Prabowo, H., & Setiawan, I., 2021), akurasi data merupakan komponen paling esensial dalam implementasi program perlindungan sosial. Tanpa data yang terkini dan dapat diverifikasi, probabilitas kesalahan sasaran akan meningkat secara signifikan. DTSEN merupakan respons terhadap masalah ini dengan menawarkan basis data yang lebih sistematis dan akuntabel yang terintegrasi dengan berbagai lembaga pemerintah. Dari perspektif sosiologis, DTSEN tidak hanya berfungsi sebagai repositori informasi tetapi juga sebagai alat tata kelola yang memperkuat legitimasi negara dalam mengatur distribusi kesejahteraan kepada rakyatnya.

3) Lanjut Usia Miskin sebagai Kelompok Rentan dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial

Lansia miskin berada dalam posisi yang sangat rentan karena mereka harus menghadapi keterbatasan fisik, penurunan kemampuan produktif, dan akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Literatur tentang kesejahteraan sosial, seperti yang disebutkan oleh (Suparlan, 2020), menunjukkan bahwa semakin tua seseorang, semakin bergantung mereka pada dukungan eksternal, baik dari lingkungan keluarga maupun dari negara. Pada titik ini, kebutuhan akan perlindungan sosial menjadi mendesak, sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab negara terhadap kelompok masyarakat yang secara struktural termarginalisasi.

Dari perspektif sosiologi pembangunan, lansia miskin sering terjebak dalam ketidakadilan struktural yang menghambat kemampuan mereka untuk mengakses layanan publik dan peluang ekonomi. Dalam konteks ini, DTSEN memainkan peran strategis. Keberadaan sistem data yang akurat memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi lansia yang benar-benar membutuhkan dukungan, terutama di tingkat lokal, seperti di kecamatan Rorotan. Keakuratan data ini merupakan persyaratan fundamental untuk implementasi kebijakan distribusi bantuan yang adil dan responsif, yang mencerminkan kondisi nyata masyarakat.

4) Penerima Bantuan Sosial dan Kerangka Kebijakan Publik Berbasis Data

Penerima Bantuan Sosial dan Kerangka Kebijakan Publik Berbasis Data

Bantuan sosial merupakan alat penting dalam arsitektur kebijakan publik yang dirancang untuk mengurangi beban pada komunitas miskin dan meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Kemiskinan mengatur bahwa penerima bantuan sosial harus ditentukan melalui proses verifikasi yang sah berdasarkan data resmi pemerintah. Oleh karena itu, pengumpulan data yang akurat merupakan prasyarat mutlak untuk distribusi bantuan yang tertarget.

Di sinilah DTSEN memainkan peran krusial. Sistem ini menyediakan basis data yang menjadi landasan untuk menentukan calon penerima bantuan, sehingga mekanisme distribusi dapat dilaksanakan secara transparan, terukur, dan dapat diaudit. Prinsip kebijakan berbasis data dalam teori kebijakan publik menekankan bahwa keputusan yang didasarkan pada data dapat meminimalkan bias dan memperkuat akuntabilitas kebijakan. Hal ini sejalan dengan gagasan (Kooiman, 2003) tentang tata kelola kolaboratif, yang memandang kesuksesan kebijakan sosial sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tingkat partisipasi masyarakat. Melalui integrasi data dalam DTSEN, potensi penyalahgunaan alokasi dapat diminimalkan dan efektivitas program bantuan dapat dioptimalkan lebih lanjut.

5) Pemikiran (Talcott Parsons, 1951) melalui The Social System

Dalam Sistem Sosial (Talcott Parsons, 1951), Parsons berargumen bahwa masyarakat berfungsi sebagai sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling mendukung untuk mempertahankan keseimbangan sosial. Parsons merumuskan empat fungsi dasar yang harus dijalankan oleh setiap sistem sosial, yang dikenal sebagai skema AGIL: *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency*.

Kerangka kerja AGIL dapat digunakan untuk memahami bagaimana DTSEN berfungsi dalam konteks kebijakan sosial:

- a) *Adaptation* (A), fungsi adaptasi tercermin dalam upaya pemerintah untuk membangun sistem data sosial yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, seperti penggunaan Nomor Induk Penduduk (NIK) sebagai dasar pengumpulan data nasional. Pembaruan teknologi merupakan cara bagi sistem untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat.
- b) *Goal Attainment* (G), DTSEN secara langsung terkait dengan tujuan utama pemerintah untuk meningkatkan akurasi program bantuan sosial. Keberadaan sistem data tunggal memudahkan pencapaian tujuan ini secara lebih terstruktur.
- c) *Integration* (I), fungsi integrasi terlihat jelas dalam koordinasi antara lembaga-lembaga seperti Kementerian Sosial, Bappenas, BPS, pemerintah daerah, dan kecamatan. Tanpa integrasi institusional yang efektif, DTSEN tidak dapat berfungsi secara optimal.
- d) *Latency* (L), fungsi pemeliharaan pola tercermin dalam upaya untuk menjaga keadilan, transparansi, dan kepercayaan publik dalam pengumpulan data sosial. Nilai-nilai ini perlu dipertahankan agar sistem tetap stabil dan dipatuhi oleh masyarakat.

Oleh karena itu, efektivitas DTSEN dapat dipahami sebagai hasil dari sistem sosial yang harmonis. Jika salah satu fungsi tidak berfungsi, misalnya koordinasi yang lemah antara lembaga, stabilitas sistem terganggu dan dampak sosial muncul, seperti ketidakadilan dalam distribusi bantuan atau penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Pendekatan ini selaras dengan orientasi penelitian, yang berupaya mengeksplorasi secara mendalam bagaimana Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dioperasikan dalam proses penentuan penerima bantuan sosial bagi lansia miskin di tingkat kecamatan. Menurut (Creswell, 2018), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami suatu fenomena dari perspektif aktor yang terlibat, sekaligus mengeksplorasi makna, pola interaksi, dan dinamika sosial yang menyertai implementasi suatu kebijakan.

Desain deskriptif-analitis dipilih karena penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk mendeskripsikan kondisi empiris tetapi juga untuk menguji hubungan antara mekanisme pengumpulan data sosial dan implementasinya di Kecamatan Rorotan. Analisis yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang sejauh mana DTSEN bekerja di tingkat lokal, termasuk relevansi, efektivitas, dan berbagai kendala yang muncul dalam implementasinya di lapangan..

Lokasi penelitian difokuskan pada Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Daerah ini dipilih secara sengaja karena Rorotan merupakan salah satu desa yang telah

menerapkan pembaruan data sosial melalui Sistem Pengumpulan Data Nasional (DTSEN), khususnya terkait proses pengumpulan data calon penerima bantuan sosial kategori lansia miskin. Karakteristik sosial ekonomi masyarakat Rorotan yang beragam juga menjadikan daerah ini relevan untuk penelitian dari perspektif perlindungan sosial berbasis data.

Penelitian ini berlangsung selama dua bulan, dari Oktober hingga November 2025. Jangka waktu ini mencakup semua tahapan penelitian, mulai dari observasi awal dan pengumpulan data primer hingga verifikasi informasi, analisis, dan penyusunan laporan akhir.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama:

1. Data primer, diperoleh langsung melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi lapangan. Data ini digunakan untuk mengeksplorasi pemahaman dan pengalaman para aktor yang terlibat dalam proses pengumpulan data DTSEN di Desa Rorotan.
2. Data sekunder, yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah seperti laporan dari Dinas Sosial Jakarta, data DTSEN, peraturan kebijakan, dan literatur akademis terkait. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks bagi temuan lapangan.

Untuk memperoleh data yang mendalam dan akurat, penelitian ini menggunakan teknik-teknik berikut:

1. Wawancara mendalam, wawancara semi-terstruktur, dilakukan dengan pengumpul data kelurahan, petugas Dinas Sosial, dan lansia miskin, baik yang telah maupun belum menerima bantuan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif informan tentang proses pengumpulan data DTSEN, tantangan yang mereka hadapi, dan persepsi mereka tentang sistem tersebut.
2. Observasi partisipatif, dilakukan di kantor kelurahan dan di masyarakat untuk mengamati secara langsung proses pembaruan data, validasi penerima, dan dinamika interaksi antar aktor. Melalui observasi, peneliti dapat menangkap fenomena yang tidak muncul dalam wawancara.
3. Studi dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan arsip dan data administratif, seperti daftar penerima bantuan sosial, laporan pembaruan DTSEN, dan data sosial ekonomi tentang lansia di daerah tersebut. Dokumen-dokumen ini berfungsi untuk memverifikasi informasi dan melengkapi temuan dari wawancara dan observasi.

Analisis data dilakukan secara interaktif sebagaimana dikemukakan (Miles, M. B., & Huberman, A. M, 1994), yang meliputi:

1. Reduksi data, dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang tidak relevan dihilangkan untuk memfokuskan analisis.
2. Penyajian data: Hasil reduksi data kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau diagram untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi: Proses ini dilakukan melalui interpretasi mendalam terhadap data yang disajikan untuk menemukan makna dan temuan kunci yang berkaitan dengan peran DTSEN dalam menentukan lansia miskin. Verifikasi

dilakukan berulang kali untuk memastikan kesimpulan tetap konsisten dengan data lapangan.

4. Triangulasi data: Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat validitas data dan memastikan konsistensi temuan penelitian.

Penelitian ini juga memprioritaskan etika penelitian sosial. Untuk itu, beberapa langkah penting telah diambil. Pertama, peneliti menjelaskan tujuan dan proses penelitian kepada informan sebelum pengumpulan data dimulai. Kedua, persetujuan informan diperoleh secara sukarela melalui mekanisme persetujuan yang diinformasikan. Ketiga, identitas informan dirahasiakan dan tidak dimasukkan dalam laporan penelitian. Keempat, semua informasi dan dokumen yang diperoleh dirahasiakan dan hanya digunakan untuk tujuan akademis.

D. Hasil Dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Peran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Sebagai Lanjut Usia Miskin

- 1) Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) sebagai Dasar Identifikasi Awal Kondisi Sosial Ekonomi

Dalam upaya mengidentifikasi kondisi sosial-ekonomi rumah tangga khususnya lansia yang berada dalam situasi rentan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berperan sebagai dasar awal yang sangat strategis. Di Kelurahan Rorotan, sistem ini dimanfaatkan sebagai tahap awal penyaringan calon penerima bantuan, sebelum dilakukan verifikasi lebih mendalam. Petugas menggunakan berbagai fitur dalam DTSEN maupun pendekatan langsung melalui kunjungan lapangan untuk memastikan akurasi informasi. Data yang tersedia memberikan gambaran awal mengenai komposisi keluarga, profil demografis, serta indikator kerentanan sosial-ekonomi yang relevan bagi lansia di wilayah tersebut.

Hayati, pendamping sosial berusia 30 tahun, menjelaskan:

“DTSEN menjadi acuan pertama dalam kerja kami. Melalui data ini, kami dapat mengidentifikasi lansia yang berpotensi masuk kategori miskin, sebelum melakukan konfirmasi lebih lanjut melalui kunjungan ke rumah mereka.”

Pernyataan Hayati menggarisbawahi bahwa DTSEN berfungsi sebagai alat skrining awal yang membantu mempersempit sasaran verifikasi. Dengan memiliki daftar perkiraan penerima bantuan sejak tahap awal, petugas dapat merancang penjangkauan lapangan secara lebih efisien dan terarah. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya mempercepat proses penapisan, tetapi juga membantu menetapkan prioritas siapa yang paling membutuhkan dan layak diverifikasi lebih lanjut

Meski begitu, data dalam DTSEN tidak digunakan sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir. Petugas tetap harus melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan bahwa kondisi sebenarnya sesuai dengan data yang tercatat. Dengan begitu, DTSEN berfungsi sebagai pembuka jalan untuk memahami situasi secara umum, sedangkan validasi langsung menjadi

tahap penting untuk memastikan bahwa keputusan akhir benar-benar mencerminkan kondisi para lansia dalam kehidupan sehari-hari

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa pemanfaatan DTSEN dalam proses identifikasi awal tercermin melalui beberapa praktik berikut:

- Petugas menjadikan DTSEN sebagai daftar awal yang harus diverifikasi melalui kunjungan langsung.
- Data tersebut membantu mengelompokkan lansia berdasarkan tingkat kerentanan awal sebelum dilakukan verifikasi lebih komprehensif melalui sistem DTSEN.
- DTSEN membantu meminimalisasi kesalahan identifikasi awal, terutama di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Rorotan.

Dari pandangan peneliti, penggunaan DTSEN pada tahap ini memberikan kemudahan bagi petugas dalam menyusun proses identifikasi dengan lebih terstruktur. Namun demikian, kualitas data sangat bergantung pada ketepatan pembaruan administrasi kependudukan baik oleh warga maupun pemerintah lokal. Ketika pembaruan data tidak berjalan secara optimal, ketidaksesuaian informasi sulit untuk dihindari, sehingga verifikasi lapangan tetap menjadi tahapan yang sangat penting untuk memastikan akurasi pendataan

Gambar 1. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional

No. Kartu	Rangsang	Periode	No. Raking	Atas Nama	Nominal (Rp.)	Status Transaksi
1139675	BANKOSS SEMBAKO	SEMBAKO OKT - DES 2023	133220153	PAULINA TUTUHATUNEKA	100	Berkas Data Raking
1139675	BANKOSS SEMBAKO	SEMBAKO JAN - SEP 2023	133	PAULINA TUTUHATUNEKA	50	
1139675	BANKOSS SEMBAKO	PENERIMA SEMBAKO JUN - JUL 2023	133	PAULINA TUTUHATUNEKA	100	
1139675	BANKOSS SEMBAKO	SEMBAKO APR - JUN 2023	133	PAULINA TUTUHATUNEKA	100	
1139675	BANKOSS SEMBAKO	SEMBAKO JAN - MAR 2023	133	PAULINA TUTUHATUNEKA	100	Sudah Transaksi
1139675	BANKOSS SEMBAKO	SEMBAKO OKT - DES 2024	133	PAULINA TUTUHATUNEKA	100	Sudah Transaksi
1139675	BANKOSS SEMBAKO	SEMBAKO JAN - SEP 2024	133	PAULINA TUTUHATUNEKA	100	Sudah Transaksi
1139675	BANKOSS SEMBAKO	SEMBAKO JAN - AGS 2024	133	PAULINA TUTUHATUNEKA	100	Proses Bankal
1139675	BANKOSS SEMBAKO	SEMBAKO APR - JUN 2024	133	PAULINA TUTUHATUNEKA	100	Sudah Transaksi
1139675	BANKOSS SEMBAKO	SEMBAKO FEB - MAR 2024	133	PAULINA TUTUHATUNEKA	100	Sudah Transaksi
1139675	BANKOSS SEMBAKO	SEMBAKO JAN 2024	133	PAULINA TUTUHATUNEKA	100	Sudah Transaksi

Sumber : Data Primer

Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Sentana



Sumber : Data Primer

2) Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai Sistem Verifikasi dan Validasi yang Lebih Komprehensif

Untuk menjamin akurasi data sosial-ekonomi, DTSEN tidak hanya berperan sebagai repositori informasi, tetapi lebih dari itu berfungsi sebagai sarana kritis dalam proses verifikasi dan validasi calon penerima bantuan, khususnya lansia miskin, sebelum penetapan akhir dilakukan. Keunggulan sistem ini terletak pada struktur mekanisme verifikasi yang sistematis serta integrasinya dengan basis data kependudukan nasional. Keterkaitan ini tidak hanya meningkatkan transparansi proses penapisan, tetapi juga meminimalkan potensi bias atau keputusan yang terlalu bergantung pada pertimbangan subjektif petugas di lapangan

Hal tersebut ditegaskan pula oleh Ahmad Januar Abdi, operator DTSEN berusia 36 tahun di Kelurahan Rorotan, yang menyampaikan “Melalui DTSEN, kami dapat langsung memantau status verifikasi tiap lansia mana yang telah sesuai dan mana yang belum. Jika terdapat ketidaksesuaian data, sistem secara otomatis menandainya dengan warna merah, yang kemudian menjadi acuan bagi kami untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi”

Uraian Ahmad menggambarkan bagaimana DTSEN mempermudah proses validasi. Ketika profil seorang lansia dibuka, sistem segera membandingkan informasinya mulai dari NIK, alamat, hingga indikator kerentanan sosial dengan data pada basis nasional. Apabila semua elemen selaras, status data langsung dinyatakan valid. Namun, bila ditemukan ketidakcocokan, sistem memberikan penanda merah sebagai indikasi perlunya pemeriksaan lebih lanjut.

Tanda merah ini bukan sekadar pemberitahuan teknis, melainkan juga pengingat bahwa kehati-hatian diperlukan dalam pengambilan keputusan. Petugas harus mengklarifikasi apakah perbedaan tersebut bersumber dari perubahan kondisi yang belum diperbarui, kesalahan administrasi, atau kesalahan entri data sebelumnya. Oleh karena itu, kunjungan lapangan menjadi langkah wajib untuk memverifikasi kesesuaian antara data dalam sistem dan kondisi riil di lapangan meliputi keabsahan dokumen kependudukan, kondisi hunian, hingga situasi sosial-ekonomi keluarga bersangkutan.

Dengan mekanisme semacam ini, DTSEN beroperasi sebagai penyaring awal yang membedakan antara data yang telah memenuhi syarat dan data yang masih memerlukan konfirmasi. Hasilnya, petugas dapat mengalokasikan waktu dan tenaga secara lebih tepat, yaitu terfokus pada kasus-kasus yang memang membutuhkan pendalaman, sehingga efisiensi dan ketepatan sasaran program perlindungan sosial pun meningkat.

Selama observasi di kantor kelurahan, peneliti mencatat beberapa pola pemanfaatan DTSEN dalam proses verifikasi dan validasi, antara lain:

- a) Petugas mengakses profil lansia melalui aplikasi DTSEN, yang memuat indikator penting seperti kondisi ekonomi, jenis tempat tinggal, status pekerjaan, dan keberadaan penanggung keluarga.
- b) Beberapa data muncul dengan tanda merah, menandakan bahwa ketidaksinkronan dengan data Dukcapil atau belum tervalidasi
- c) Petugas kemudian mencocokkan informasi tersebut melalui kunjungan lapangan untuk memastikan kebenaran data, termasuk meninjau kondisi rumah, dokumen resmi, serta situasi keluarga lansia.

- d) Setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan temuan lapangan, sistem memperbarui status data menjadi valid ditandai dengan tanda hijau sehingga lansia tersebut dapat diproses lebih lanjut sebagai calon penerima bantuan.

Dari hasil pengamatan di lapangan, proses verifikasi pada DTSEN berjalan melalui dua mekanisme yang saling melengkapi. Seorang petugas menjelaskan bahwa kami melakukan pengecekan digital di sistem sekaligus verifikasi faktual lewat kunjungan rumah, dan keduanya tidak bisa dipisahkan. Pendekatan ganda ini memungkinkan ketidaksesuaian data teridentifikasi sejak awal, sehingga akurasi informasi dapat dijaga pada tingkat yang lebih tinggi.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penggunaan DTSEN berdampak signifikan terhadap peningkatan akurasi proses verifikasi maupun validasi. Standar indikator yang digunakan secara nasional membuat penilaian antartugas menjadi lebih seragam, sehingga perbedaan dalam penetapan kelayakan dapat ditekan. Seorang informan bahkan menekankan bahwa fitur penanda otomatis dalam sistem sangat membantu kami mengenali data yang janggal sebelum salah mengambil keputusan. Tak hanya itu, keterhubungan DTSEN dengan data kependudukan Dukcapil memungkinkan pengecekan identitas dilakukan secara langsung, sehingga profil penerima menjadi lebih tepat dan potensi bantuan ganda dapat diminimalkan.

Ketika hasil pengecekan digital dikonfirmasi kembali melalui temuan di lapangan, kualitas data yang diperoleh menjadi jauh lebih kuat, menyeluruh, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seorang petugas bahkan menyebut bahwa perpaduan dua metode ini membuat keputusan kami tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kondisi nyata masyarakat. Melalui mekanisme berlapis tersebut, DTSEN bukan sekadar memperbaiki aspek administratif, tetapi juga mempertegas unsur keadilan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.

Gambar 3. Pengecekan langsung di Aplikasi DTSEN



Sumber : Data Primer

3) Peran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam Pemetaan Kerentanan Lansia Miskin

Dalam upaya menanggulangi kemiskinan di kalangan lansia, DTSEN memegang peranan penting sebagai instrumen pemetaan yang memanfaatkan data terstruktur untuk mengidentifikasi tingkat kerentanan mereka. Lebih dari sekadar memuat informasi dasar seperti identitas dan alamat, sistem ini menghimpun berbagai indikator yang mencerminkan kondisi hidup para lansia, mulai dari kualitas tempat tinggal, besaran pendapatan, akses terhadap jaminan sosial, hingga ketersediaan dukungan keluarga. Melalui pendekatan tersebut,

proses pemetaan kerentanan dapat dilakukan secara lebih transparan dan berlandaskan fakta objektif, bukan sekadar penilaian perkiraan.

Dalam sebuah wawancara, pendamping sosial bernama Hayati, yang berusia 30 tahun, membagikan pengalamannya:

“Melalui DTSEN, kami bisa langsung melihat lansia mana yang hidup sendirian, rumahnya dalam kondisi tidak layak, atau bahkan mereka yang sama sekali tidak memiliki sumber penghasilan. Dari data itu, kami dapat memetakan siapa yang paling mendesak bantuan.”

Seperti yang ditekankan oleh Hayati, pekerja sosial yang disebutkan di atas, bahwa DTSEN tidak hanya berfokus pada kemiskinan, tetapi juga memberikan gambaran holistik tentang kerentanan lansia, termasuk apakah mereka tinggal sendirian, apakah perumahan mereka memadai, atau apakah mereka memiliki anggota keluarga yang siap membantu. Pada dasarnya, sistem ini berfungsi sebagai panduan untuk menentukan prioritas bantuan dengan lebih akurat.

Selama observasi lapangan, para peneliti menyaksikan bagaimana petugas sosial sering mengakses indikator kerentanan di aplikasi DTSEN selama pengumpulan data. Di dalam sistem, mereka dapat meninjau detail seperti kondisi perumahan, status tempat tinggal (sendirian atau bersama keluarga), pendapatan, cakupan asuransi kesehatan, dan kondisi kesehatan dasar. Informasi ini memungkinkan para petugas untuk mengidentifikasi lansia yang paling membutuhkan, dengan mereka yang memiliki perumahan yang tidak memadai atau tinggal sendirian biasanya diprioritaskan.

Menurut para peneliti, pemetaan kerentanan melalui DTSEN sangat efektif dalam mengidentifikasi lansia yang benar-benar membutuhkan intervensi. Sistem ini memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi sosial ekonomi mereka, menghilangkan kebutuhan bagi petugas untuk bergantung pada asumsi atau data yang tidak terverifikasi. Lebih lanjut, indikator-indikator ini memastikan proses penyortiran yang lebih adil, karena didasarkan pada standar nasional yang objektif, memungkinkan lansia yang paling rentan untuk diprioritaskan tanpa bias.

Keseluruhannya, DTSEN memperkuat mekanisme pemetaan kerentanan dengan menyediakan data yang lengkap, terorganisir, dan mudah dianalisis, sehingga program bantuan sosial dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran dan efisien

Gambar 4. Kondisi Rumah Lansia Miskin



Sumber : Data Primer

b. Peran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam Penetapan Penerima Bantuan Sosial

1) Peran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Sebagai Instrumen Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam rangka memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyaluran bantuan sosial, sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjalankan fungsi strategis sebagai mekanisme yang memungkinkan setiap tahapan penetapan penerima bantuan ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Dengan menyimpan semua data dan riwayat pengumpulan data secara digital, sistem ini memungkinkan penelusuran kembali setiap perubahan, verifikasi, atau keputusan. Akibatnya, proses identifikasi tidak lagi bergantung pada penilaian subjektif dari petugas, tetapi pada data yang divalidasi secara sistematis.

Seorang pekerja sosial, Hayati, 30, berbagi pengalamannya dalam sebuah percakapan. Dia berkata, "Dengan DTSEN, seluruh proses menjadi transparan. Siapa yang ada dalam daftar siapa yang tidak dan alasan mengapa data tidak diterima semuanya tercatat dalam sistem. Jadi kita tidak bisa begitu saja menugaskan seseorang secara acak tanpa basis data yang solid."

Seperti yang dijelaskan oleh Hayati, pekerja sosial, DTSEN membuat seluruh proses penentuan penerima bantuan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Petugas tidak dapat memasukkan nama secara sembarangan, karena setiap keputusan harus didasarkan pada informasi yang tersimpan dalam sistem.

Selain itu, DTSEN mencatat alasan penerimaan atau penolakan, memungkinkan petugas untuk menjelaskan keputusan mereka secara transparan kepada publik. Karena semua langkah dicatat secara digital, risiko praktik seperti penyuapan, nepotisme, atau manipulasi data sangat berkurang. Pada dasarnya, sistem ini bertindak sebagai mekanisme pengawasan, memastikan bahwa distribusi bantuan dilakukan secara tertib, adil, dan bebas dari penyalahgunaan.

Selama observasi lapangan, peneliti mengamati bahwa petugas hanya dapat menominasikan individu lanjut usia yang datanya telah divalidasi di DTSEN. Setiap modifikasi data oleh petugas segera dicatat dalam sistem, memastikan tidak ada aktivitas yang tidak terdeteksi. Para peneliti juga mengamati bahwa daftar penerima dicetak langsung dari aplikasi DTSEN, bukan dari rekomendasi informal, sehingga seluruh proses menjadi transparan karena setiap langkah pengumpulan data dapat dilacak.

Dari analisis peneliti DTSEN secara signifikan meningkatkan akuntabilitas melalui beberapa aspek kunci:

- a) Setiap keputusan didasarkan pada data objektif, bukan opini pribadi atau permintaan eksternal.
- b) Semua proses dapat dilacak, sehingga meminimalkan kemungkinan manipulasi.
- c) Petugas memiliki landasan kuat untuk menjelaskan keputusan kepada masyarakat.
- d) Sistem ini mencegah penerimaan bantuan oleh yang tidak layak, sambil memastikan mereka yang benar-benar membutuhkan tidak terlewatkan.

Peneliti melihat bahwa DTSEN mendorong proses penetapan penerima bantuan menuju praktik yang lebih jujur, profesional, dan dapat dipercaya. Sistem ini memperkuat tata

Gambar 5. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dengan status Gagal Cek Rekening

Sumber : Data Primer

Dalam proses penentuan penerima bantuan sosial, Sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berfungsi sebagai referensi utama untuk menilai kelayakan berdasarkan indikator yang telah divalidasi. Efektivitasnya telah mengurangi kesalahan inklusi, di mana bantuan diterima oleh mereka yang tidak memenuhi syarat, dan kesalahan eksklusi, di mana individu yang memenuhi syarat terabaikan. DTSEN mencapai hal ini dengan menyediakan data standar, indikator kerentanan yang jelas, dan mekanisme verifikasi otomatis yang mendeteksi perbedaan. Akibatnya, penentuan penerima menjadi lebih akurat dan adil.

Seperti yang dijelaskan Bapak Sarmat, petugas mengevaluasi data pribadinya melalui sistem DTSEN. Setelah memverifikasi bahwa data tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan, petugas menyimpulkan bahwa ia memang memenuhi syarat. Dengan kata lain, keputusan tersebut didasarkan pada data yang tersimpan di DTSEN, bukan sekadar tebakan atau opini pribadi.

28

Peneliti juga menjumpai beberapa kasus di mana lansia yang semula tidak terdata karena belum pernah terdaftar atau mengalami perubahan kondisi akhirnya dapat dimasukkan ke dalam sistem setelah petugas melakukan pendataan ulang di lapangan dan memperbarui informasinya langsung melalui DTSEN. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tidak bersifat eksklusif; ia tidak hanya berfungsi sebagai penyaring, tetapi juga sebagai instrumen inklusi bagi mereka yang terlewat dalam pendataan awal, selama hasil verifikasi faktual mendukung kelayakan mereka. Temuan ini sejalan dengan pengalaman Bapak Sarmat, di mana keputusan akhir didasarkan pada kebenaran dan kelengkapan data bukan pada preferensi atau pertimbangan pribadi petugas.

Secara umum, penerapan DTSEN di lapangan menegaskan komitmen terhadap akurasi data sebagai prinsip dasar dalam penyaluran bantuan sosial. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan ketepatan sasaran, tetapi juga memperkuat prinsip keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program perlindungan sosial.

Gambar 6. Salah satu lansia penerima bantuan Bapak Sarmat



Sumber : Data Primer

3) Peran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai Acuan Penetapan Akhir Penerima Bantuan Sosial

Dalam proses penentuan penerima bantuan sosial, Sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berfungsi sebagai dasar utama yang digunakan pemerintah untuk menilai apakah seorang lansia miskin memenuhi syarat. Setelah melewati tahap verifikasi dan validasi, status di DTSEN menjadi faktor penentu akhir. Jika status seseorang *valid*, petugas dapat secara resmi mengusulkan mereka namun, jika data belum divalidasi, lansia tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai penerima, bahkan dengan rekomendasi dari komunitas mereka. Dengan demikian, DTSEN bertindak sebagai filter akhir dan dokumen resmi yang digunakan sebagai referensi dalam menentukan bantuan.

Seorang operator DTSEN berusia 36 tahun, Ahmad Januar Abdi, menyampaikan pandangannya dalam sebuah percakapan. Ia menyatakan, "Jika status

di DTSEN valid atau hijau, maka kita dapat menambahkan mereka ke daftar penerima bantuan. Jika masih merah, meskipun direkomendasikan, tetap tidak dapat diproses."

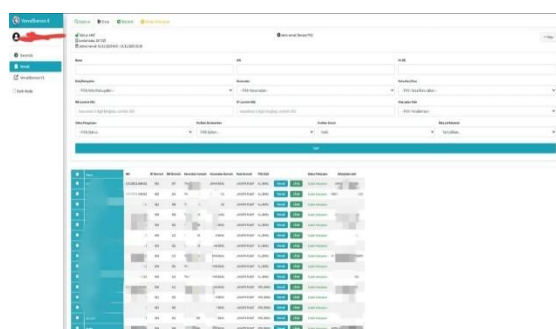
Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Januar, DTSEN merupakan penentu utama dalam proses pengambilan keputusan. Jika data seorang lansia lengkap dan akurat, sistem akan menampilkan tanda hijau, yang memungkinkan individu tersebut ditambahkan ke dalam daftar. Sebaliknya, jika data tidak valid atau tidak akurat, tanda merah akan muncul. Dalam situasi seperti itu, meskipun ada rekomendasi dari asosiasi lingkungan (RT) atau warga setempat, petugas tidak dapat memproses data sampai data tersebut dikoreksi dan divalidasi. Hal ini menegaskan bahwa keputusan akhir mengikuti data dalam DTSEN, bukan rekomendasi atau permintaan pribadi.

Selama observasi lapangan, sebagai peneliti menyaksikan petugas hanya mengunduh dan mencetak daftar penerima bantuan langsung dari aplikasi DTSEN. Tidak ada nama yang ditambahkan secara manual. Setiap nama dalam daftar diberi status *valid* atau ditandai hijau dalam sistem. Di sisi lain, nama-nama lansia dengan data yang tidak lengkap atau tidak akurat tidak muncul dalam daftar akhir, meskipun beberapa warga secara verbal menyampaikan kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa DTSEN merupakan referensi utama yang tidak dapat diabaikan dalam penentuan akhir.

Dari perspektif para peneliti, penggunaan DTSEN sebagai dasar untuk keputusan akhir sangat penting karena membuat proses pengambilan keputusan lebih objektif. Petugas tidak lagi bergantung pada penilaian pribadi atau rekomendasi dari pihak-pihak tertentu, sehingga menghilangkan risiko menerima penerima palsu. DTSEN juga memberikan dasar yang jelas dan formal bagi petugas untuk menjelaskan kepada publik mengapa seseorang diterima atau ditolak. Lebih lanjut, sistem ini memastikan bahwa bantuan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar memenuhi kriteria kemiskinan dan kerentanan berdasarkan data yang valid.

Secara keseluruhan, peneliti mengamati bahwa mengandalkan DTSEN membuat proses distribusi bantuan lebih transparan, adil, dan akuntabel..

Gambar 7. Aplikasi VervalBansos



Sumber : Data Primer

2. Pembahasan Penelitian

a. Peran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai Penentu Lansia Miskin

1) Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai Dasar Identifikasi Awal Kondisi Sosial Ekonomi

Pada tahap awal pendataan, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berfungsi sebagai instrumen penyaring utama yang menghadirkan potret menyeluruh mengenai kondisi sosial ekonomi rumah tangga, terutama kelompok lansia. Di kelurahan Rorotan, sistem ini menyediakan informasi dasar seperti status tempat tinggal, komposisi keluarga, dan indikator pendapatan, yang kemudian digunakan oleh pekerja sosial untuk menyusun daftar awal orang lanjut usia yang diduga termasuk dalam kategori tersebut.

Penggunaan dtsen pada fase ini mencerminkan fungsi adaptasi dalam kerangka kerja AGIL yang diusulkan oleh (Parson, 1951). Sistem pengumpulan data adaptif memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan metode identifikasinya dengan dinamika sosial yang berubah di masyarakat melalui mekanisme penyaringan berbasis data. DTSEN membantu kelurahan mengelola penugasan pengumpul data secara lebih efisien dan efektif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan DTSEN dapat mengurangi kesalahan identifikasi awal, terutama di daerah padat penduduk yang rentan terhadap duplikasi data atau ketidakakuratan pencatatan administratif. Namun, ketergantungan pada data administratif tidak tanpa kelemahan. Ketika pembaruan informasi populasi tidak dilakukan secara konsisten, kesenjangan antara data sistem dan kondisi aktual di lapangan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, meskipun DTSEN sangat membantu dalam penyaringan awal, validasi melalui kunjungan rumah tetap menjadi langkah penting dalam proses verifikasi sosial.

Kondisi ini sejalan dengan pandangan (Soekanto, 2017) yang menekankan bahwa peran sosial bersifat dinamis dan harus beradaptasi dengan perubahan sosial. Dalam konteks pengumpulan data, petugas lapangan tidak hanya melaksanakan tugas administratif, tetapi juga menjalankan fungsi sosial untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan benar-benar mewakili situasi nyata di masyarakat.

2) Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai Sistem Verifikasi dan Validasi yang Lebih Komprehensif

Dalam kajian ini, terlihat bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak hanya berfungsi sebagai wadah penyimpanan data awal, melainkan berkembang menjadi perangkat validasi yang bekerja secara sistematis. Sistem ini melakukan pemeriksaan otomatis terhadap kesesuaian berbagai indikator sosial ekonomi dengan basis data kependudukan nasional, terutama melalui keterhubungannya dengan database Dukcapil. Ketika ketidaksesuaian terdeteksi, seperti perbedaan alamat atau Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang tidak sesuai, sistem secara otomatis mengeluarkan peringatan, memungkinkan petugas untuk melakukan koreksi dengan cepat dan secara terarah

Dari perspektif Teori Sistem Informasi Sosial, seperti yang dijelaskan oleh (Prabowo, H., & Setiawan, I, 2021), mekanisme verifikasi digital ini merupakan pilar penting bagi kebijakan yang mengandalkan data sebagai dasar pengambilan keputusan (*evidence-based policy*). Proses pengambilan keputusan tidak lagi bergantung pada penilaian pribadi pejabat, melainkan mengikuti data yang telah melalui serangkaian verifikasi berlapis. Dengan cara ini,

pengelolaan kebijakan sosial bergerak menuju tingkat objektivitas dan akuntabilitas yang lebih tinggi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme verifikasi ini sejalan dengan fungsi integrasi dalam teori Parsons. Integrasi antara temuan lapangan, data yang disimpan dalam DTSEN, dan informasi populasi dari Dukcapil telah menghasilkan alur kerja birokrasi yang lebih seragam dan terintegrasi. Ketika sistem mendeteksi ketidaksesuaian data, kasus tersebut secara otomatis diprioritaskan untuk diperiksa ulang melalui kunjungan langsung ke rumah warga. Mekanisme pengecekan berlapis menggabungkan analisis digital dan verifikasi faktual di lapangan membuat keputusan yang diambil benar-benar bertumpu pada informasi yang valid, sehingga peluang terjadinya kekeliruan dapat diminimalkan dan penerima bantuan terlindungi dari potensi ketidakadilan.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (SMERU, 2021), yang menunjukkan bahwa sistem verifikasi digital yang terintegrasi mampu menekan peluang manipulasi data, mempercepat proses penetapan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial. Praktik serupa terlihat di Kelurahan Rorotan, di mana petugas tidak diperbolehkan mengajukan nama baru apabila status data seseorang masih berwarna merah dalam aplikasi. Aturan sederhana ini berfungsi sebagai mekanisme pengaman yang menjaga integritas proses pendataan.

Dengan demikian, teknologi dalam DTSEN tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga menjadi mitra penting dalam mewujudkan tata kelola bantuan yang lebih adil, akuntabel, dan responsif terhadap kondisi warga.

3) Peran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam Pemetaan Kerentanan Lansia Miskin

Dalam penelitian ini tampak jelas bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) membuka akses terhadap pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai kerentanan lansia miskin, jauh melampaui keterbatasan pendataan manual yang sering kali bersifat dangkal dan parsial. Melalui DTSEN, berbagai indikator kerentanan dapat dievaluasi secara komprehensif, mulai dari kondisi tempat tinggal yang memadai atau tidak memadai, keberadaan anggota keluarga yang dapat memberikan dukungan, tingkat kemandirian lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari, hingga kepemilikan asuransi kesehatan. Data yang dikumpulkan melalui sistem ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kehidupan lansia, bukan hanya angka-angka, tetapi gambaran yang mencerminkan realitas sosial yang kompleks dan penuh dengan isu-isu.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep kemiskinan multidimensi yang diusulkan oleh (Alkire dan Foster, 2011), yang memandang kemiskinan tidak hanya sebagai masalah kekurangan pendapatan, tetapi sebagai kondisi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk akses terbatas terhadap layanan dasar, penurunan kemampuan fisik, dan dukungan sosial yang rapuh. Kerangka kerja ini sangat relevan ketika diterapkan pada orang lanjut usia, yang sering menghadapi berbagai tantangan mulai dari ketidakstabilan ekonomi dan penurunan kesehatan fisik hingga situasi sosial yang menyebabkan isolasi, terutama bagi mereka yang tinggal sendirian di perumahan yang tidak layak.

Dari perspektif teori peran sosial, pekerjaan pengumpul data tidak hanya terbatas pada pelaksanaan prosedur teknis. Mereka juga memainkan peran kemanusiaan dalam memahami konteks sosial, menilai tingkat kerentanan, dan merekam kondisi kehidupan yang tidak sepenuhnya tercermin dalam data formal. Misalnya, fakta bahwa seorang lansia tinggal

sendirian bukan sekadar informasi administratif, tetapi indikator risiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lansia yang masih tinggal bersama anggota keluarga. Ketika petugas melakukan kunjungan lapangan, mereka tidak hanya memeriksa rumah atau memeriksa dokumen, tetapi juga menyaksikan realitas kehidupan yang kadang-kadang diam, rentan, dan tidak tercatat dalam angka statistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DTSEN memberikan panduan yang lebih jelas dalam menentukan siapa yang harus diprioritaskan. Lansia yang hidup tanpa penghasilan, tinggal di perumahan yang tidak layak, atau hidup tanpa dukungan sosial dimasukkan ke dalam kelompok prioritas tinggi. Pada tahap ini, DTSEN menjalankan fungsi *Goal Attainment* dalam kerangka AGIL Parsons, yaitu memastikan tujuan kebijakan yaitu penyaluran bantuan tepat sasaran dapat tercapai.

Dengan demikian, teknologi tidak hanya berperan sebagai instrumen administratif. DTSEN menjadi jembatan yang membantu mengungkap realitas tersembunyi di balik setiap data, ada manusia dengan cerita, kerentanan, dan kebutuhan yang harus diperhatikan dalam setiap keputusan sosial

b. Peran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam Penetapan Penerima Bantuan Sosial

1) Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai Instrumen Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam kajian ini tampak bahwa digitalisasi pendataan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi fondasi penting dalam memperkuat akuntabilitas serta transparansi proses penetapan penerima bantuan sosial. Setiap tahap dalam proses pendataan mulai dari pembaruan informasi, pengajuan calon penerima, penjelasan penolakan, hingga pengecekan akhir terekam secara digital di dalam sistem, meninggalkan jejak yang tidak dapat dihapus sembarangan. Dengan mekanisme ini, kemungkinan terjadinya intervensi di luar prosedur resmi, seperti menipiskan nama tertentu, praktik pilih kasih, atau memasukkan penerima yang sebenarnya tidak berhak, dapat ditekan secara signifikan. Pendekatan ini menandai pergeseran menuju tata kelola bantuan sosial yang lebih terstruktur, transparan, dan berpihak pada prinsip keadilan.

Dilihat dari perspektif *governance* menurut (Kooiman, 2003), akuntabilitas bukan hanya pelengkap, melainkan fondasi yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik. Dalam konteks ini, DTSEN menciptakan kondisi yang mewajibkan setiap petugas bekerja sesuai data yang telah terverifikasi. Setiap nama yang diajukan harus memiliki dasar yang jelas, sehingga praktik penambahan manual diminimalkan. Pendekatan ini turut membangun kepercayaan masyarakat dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan warganya, layaknya jembatan yang dibangun di atas kejelasan prosedur dan keterbukaan informasi.

Penelitian (Handayani, Kusuma, dan Wibowo, 2022) juga menekankan bahwa digitalisasi data sosial menjadi kunci bagi terciptanya tata kelola bantuan yang akuntabel. Hal ini sejalan dengan praktik di Kelurahan Rorotan, di mana daftar final penerima bantuan selalu diunduh dan dicetak langsung dari aplikasi DTSEN tanpa adanya penambahan manual. Langkah sederhana ini memberikan dampak besar dalam menjaga integritas sistem pendataan.

Jika dilihat melalui kerangka AGIL Parsons, mekanisme pencatatan dan verifikasi ini mencerminkan fungsi *Latency*, yaitu pemeliharaan nilai-nilai dasar seperti keadilan,

keterbukaan, dan kepastian prosedur agar sistem tetap dipercaya dan dijalankan secara konsisten. Sistem berperan seperti pengawas yang teliti memastikan setiap keputusan berlandaskan data yang akurat, bukan kepentingan pribadi. Dengan demikian, DTSEN bukan sekadar alat teknologi, tetapi juga menjadi mitra penting dalam membangun tata kelola sosial yang lebih adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan

2) Peran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai Pengendali Kesalahan Sasaran (*Inclusion dan Exclusion Error*)

Dalam pembahasan ini, kita berhadapan dengan persoalan mendasar yang telah lama menghantui berbagai program bantuan sosial, yakni ketidaktepatan sasaran. Masalah ini muncul dalam dua bentuk yang saling berlawanan. Pertama, *inclusion error*, yaitu ketika seseorang yang tidak memenuhi kriteria justru menerima bantuan. Kedua, *exclusion error*, ketika individu yang seharusnya memperoleh bantuan malah tidak terdaftar sebagai penerima. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hadir sebagai jawaban struktural terhadap persoalan tersebut melalui penggunaan indikator yang terstandar, proses pemadanan data secara otomatis, dan mekanisme verifikasi yang berlangsung dari dua arah. Setiap kali ditemukan ketidaksesuaian, sistem memberikan penanda khusus sehingga petugas dapat segera melakukan pemeriksaan dan klarifikasi di lapangan.

Keandalan DTSEN dalam menekan kesalahan sasaran sejalan dengan temuan (World Bank, 2020), yang menegaskan bahwa integrasi basis data lintas lembaga mampu mengurangi baik *inclusion error* maupun *exclusion error* secara signifikan. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa para petugas di Kelurahan Rorotan mengandalkan hasil validasi sistem sepenuhnya. Bahkan rekomendasi dari RT atau tokoh masyarakat tidak dapat diteruskan apabila status data dalam DTSEN belum dinyatakan valid. Kondisi ini menegaskan peran DTSEN sebagai mekanisme kontrol yang menentukan, memastikan bahwa keputusan akhir benar-benar berdasarkan data yang telah diverifikasi.

Dilihat dari perspektif teori kebijakan publik berbasis data, DTSEN bekerja sebagai alat yang menjamin keadilan prosedural dan mencegah munculnya bias personal dari petugas lapangan. Sistem ini, dalam analogi yang sederhana, berfungsi layaknya seorang hakim yang menjaga keseimbangan: memastikan bantuan diberikan kepada mereka yang memang berhak, sekaligus mencegah kekeliruan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Melalui gambaran ini, kita dapat melihat optimisme bagi masa depan program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran di mana teknologi bukan sekadar perangkat administratif, tetapi penjaga integritas dalam upaya mewujudkan keadilan sosial

3) Peran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai Acuan Penetapan Akhir Penerima Bantuan Sosial

Dalam kajian ini terlihat bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berfungsi sebagai rujukan utama dan paling menentukan dalam proses penetapan kelayakan penerima bantuan sosial. Status “valid” yang ditandai dengan warna hijau menjadi satu-satunya dasar bagi seseorang untuk masuk dalam daftar penerima bantuan. Sebaliknya, jika data belum tervalidasi, keputusan kelayakan tidak dapat diberikan, meskipun terdapat permintaan atau dukungan dari warga sekitar

Pengaturan semacam ini menjamin bahwa proses penetapan berjalan secara objektif dan konsisten. Dalam perspektif teori *governance*, mekanisme tersebut menunjukkan adanya hierarki keputusan yang terstruktur, transparan, dan berlandaskan aturan yang sama bagi setiap individu. Dari sudut pandang sosiologis, DTSEN menjalankan fungsi *pattern maintenance*

sebagaimana dikemukakan Parsons, yakni menjaga keteraturan prosedural, kepastian, serta konsistensi dalam tata kelola sehingga seluruh aktor memahami batas kewenangan serta tanggung jawab mereka

Temuan penelitian menunjukkan bahwa petugas kelurahan tidak memiliki ruang untuk menambahkan nama secara manual ke dalam daftar penerima bantuan. Seluruh data penerima diunduh langsung dari sistem tanpa modifikasi. Hal ini memperlihatkan bahwa DTSEN bukan semata perangkat administratif, tetapi telah menjadi otoritas data yang memandu arah kebijakan bantuan sosial di tingkat lokal. Sistem ini bekerja layaknya seorang hakim yang tegas menempatkan data tervalidasi sebagai dasar tunggal bagi keputusan, sehingga setiap penetapan benar-benar bertumpu pada fakta, bukan pada tekanan emosional atau kepentingan dari lingkungan sekitar.

c. Temuan Tak Terduga

Sejumlah temuan lapangan mengungkap sisi lain dari implementasi DTSEN yang tidak selalu terlihat dalam dokumen kebijakan:

- 1) Lansia rentan yang tidak masuk DTSEN, ditemukan beberapa lansia yang sebenarnya memenuhi kriteria bantuan, tetapi tidak muncul dalam sistem karena dokumen kependudukannya tidak diperbarui. Situasi ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak otomatis menjamin kelengkapan data tanpa keterlibatan aktif masyarakat dalam pemutakhiran administrasi
- 2) Lansia tinggal bersama keluarga tetapi tidak ditanggung secara ekonomi, Sistem cenderung mengasumsikan bahwa keberadaan keluarga berarti adanya penopang finansial. Namun, realitas sosial menunjukkan hal yang berbeda: tidak semua keluarga mampu atau bersedia memberikan dukungan. Temuan ini memperlihatkan bahwa DTSEN masih menghadapi keterbatasan dalam menangkap dinamika relasi sosial yang lebih kompleks

d. Implikasi Penelitian

1) Implikasi Teoretis

Penelitian ini menguatkan relevansi teori sistem sosial Parsons dalam memaknai praktik pendataan modern. DTSEN beroperasi sebagai suatu sistem digital yang menjalankan fungsi adaptasi, integrasi, pencapaian tujuan, serta pemeliharaan nilai dan pola sejalan dengan kerangka AGIL

2) Implikasi Praktis

- a) Penetapan penerima bantuan sosial menjadi lebih tepat dan berlandaskan data yang tervalidasi.
- b) DTSEN membantu mengurangi ketidaksesuaian data dan mendorong transparansi dalam proses birokrasi
- c) Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi petugas kelurahan agar seluruh fitur dan mekanisme sistem dapat dimanfaatkan secara optimal.

e. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Penelitian dilakukan hanya di satu kelurahan, sehingga ruang generalisasi terhadap wilayah lain masih terbatas.

2. Tidak semua fitur dalam DTSEN dapat diakses peneliti, sehingga sebagian penjelasan bergantung pada informasi yang diberikan petugas lapangan.
3. Perubahan sosial masyarakat berlangsung cepat, sehingga beberapa data yang ditemukan memiliki sifat sangat kontekstual dan situasional.

Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi seperti DTSEN membawa kemajuan signifikan dalam tata kelola data dan penyaluran bantuan, keberhasilan yang menyeluruh tetap memerlukan dukungan faktor manusia, mulai dari partisipasi masyarakat hingga pemahaman petugas terhadap dinamika sosial di lingkungan mereka. Teknologi memperkuat struktur, tetapi interaksi sosial tetap menjadi fondasi utama dalam memastikan keadilan dan ketepatan sasaran.

E. Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam pendataan lansia miskin dan penetapan penerima bantuan sosial di Kelurahan Rorotan, dapat dirumuskan sejumlah kesimpulan sebagai berikut:

- a. DTSEN berfungsi sebagai langkah awal dalam mengidentifikasi lansia yang berpotensi hidup dalam kemiskinan. Melalui sistem ini, petugas memperoleh gambaran awal tentang kondisi sosial-ekonomi suatu rumah tangga, sehingga memudahkan identifikasi lansia yang berpotensi rentan. Namun, kualitas informasi dalam DTSEN sangat dipengaruhi oleh akurasi dan kelengkapan pembaruan data penduduk. Oleh karena itu, meskipun DTSEN merupakan titik awal yang sangat berguna, verifikasi lebih lanjut tidak boleh diabaikan agar tidak ada lansia yang benar-benar membutuhkan bantuan terlewatkan. Secara analogi, DTSEN seperti jaring pengaman yang dapat menangkap tanda-tanda awal kerentanan, tetapi jaring tersebut harus terus diperiksa dan diperbarui agar tidak ada celah yang terlewatkan dari pemantauan.
- b. Selain sebagai alat pengumpulan data awal, DTSEN juga memperkuat proses verifikasi dan validasi melalui mekanisme terstruktur. Sistem ini tidak hanya menampilkan data, tetapi juga memberikan panduan visual berupa penanda status, seperti warna merah untuk data yang bermasalah. Ketika terjadi ketidaksesuaian, petugas segera diminta untuk melakukan konfirmasi lapangan. Kombinasi verifikasi digital dan pemeriksaan langsung ini membuat proses pengumpulan data tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih akurat dan lebih mudah untuk dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, DTSEN berfungsi seperti supervisor yang teliti; ia tidak memberikan lampu hijau sebelum memastikan bahwa semua elemen sesuai dengan fakta di lapangan.
- c. DTSEN juga memfasilitasi pemetaan kerentanan lansia secara lebih sistematis. Berbagai variabel penting seperti kondisi tempat tinggal, kemandirian finansial, sumber penghasilan, dan cakupan jaminan sosial diproses dalam kerangka kerja terintegrasi tunggal. Informasi ini memungkinkan petugas untuk menetapkan prioritas berdasarkan kriteria objektif, bukan perkiraan. Misalnya, lansia yang tinggal sendirian, tidak memiliki penghasilan tetap, atau tinggal di perumahan yang tidak layak secara otomatis dimasukkan ke dalam kelompok prioritas utama. Dengan demikian, DTSEN membantu

menyederhanakan kompleksitas realitas sosial menjadi peta kerentanan yang dapat diukur, transparan, dan mudah diakses.

d. Transparansi dan akuntabilitas juga diperkuat melalui sistem pencatatan digital yang komprehensif. Setiap pembaruan data, perubahan status, dan keputusan akhir secara otomatis dicatat dan dapat dilacak kapan saja. Jejak digital ini secara efektif mengurangi ruang untuk praktik-praktik yang tidak transparan, seperti manipulasi data, intervensi tidak resmi, atau penunjukan penerima di luar prosedur. Keputusan diambil berdasarkan data yang telah melalui proses verifikasi, sehingga seluruh alur kerja menjadi terbuka dan akuntabel. Dalam konteks ini, DTSEN berfungsi sebagai dokumen resmi dengan jejak audit yang tidak dapat diubah secara sembarangan, dan setiap perubahan harus melalui prosedur yang sah.

e. Pada tahap akhir, DTSEN menjadi acuan mutlak dalam menentukan kelayakan penerima bantuan. Hanya orang lanjut usia dengan status valid yang ditandai dengan warna hijau yang dapat dimasukkan ke dalam daftar usulan. Sementara itu, data yang tidak lengkap atau belum diverifikasi tidak dapat diproses lebih lanjut, meskipun ada dukungan kuat dari komunitas sekitar. Mekanisme ini memastikan bahwa keputusan akhir tidak didasarkan pada pertimbangan subjektif atau hubungan pribadi, tetapi pada standar objektif yang jelas. Dengan kata lain, DTSEN berfungsi sebagai gerbang akhir yang hanya terbuka bagi mereka yang benar-benar memenuhi kriteria berdasarkan bukti yang terverifikasi.

Secara keseluruhan, DTKS dan DTSEN saling melengkapi dalam tata kelola perlindungan sosial. DTKS menyediakan landasan awal berupa data dasar, sementara DTSEN memastikan data tersebut selalu diperbarui, akurat, dan terintegrasi secara digital. Ketika kedua sistem ini bekerja sama, proses pengumpulan data, terutama untuk lansia dalam situasi rentan, menjadi lebih terarah, transparan, dan akuntabel.

Temuan studi ini juga menunjukkan bahwa kehadiran teknologi tidak menggantikan peran manusia, melainkan memperkuatnya. Sistem seperti DTSEN memungkinkan petugas bekerja lebih efisien dan objektif, sambil mempromosikan praktik perlindungan sosial yang lebih adil, terstruktur, dan menghormati martabat penerima bantuan

2. Saran

Guna meningkatkan efektivitas penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sejumlah rekomendasi dirumuskan berdasarkan temuan lapangan serta analisis mendalam terhadap hambatan-hambatan yang muncul selama pelaksanaannya. Usulan ini ditujukan kepada berbagai pihak terkait, dengan harapan perbaikan dapat dilakukan secara holistik dan berkelanjutan.

a. Bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pembaruan data secara berkala perlu dipercepat dan dibakukan, sehingga profil sosial-ekonomi yang terekam dalam DTSEN senantiasa merefleksikan kondisi riil masyarakat. Tanpa pemutakhiran yang rutin, risiko ketidaksesuaian antara data dan realitas di lapangan akan terus mengganggu ketepatan sasaran.
2. Integrasi antar-sistem khususnya antara DTSEN, Dukcapil, dan DTKS harus diperkuat. Sinergi yang lebih erat tidak hanya meminimalkan duplikasi data, tetapi juga mempercepat alur verifikasi dan meningkatkan keandalan informasi lintas instansi.
3. Pelatihan teknis berkelanjutan bagi operator dan pendamping sosial perlu diselenggarakan secara rutin. Hal ini bertujuan memastikan mereka tidak hanya

memahami antarmuka sistem, tetapi juga mampu mengadaptasi perkembangan fitur dan kebijakan terbaru.

4. Peningkatan infrastruktur digital di tingkat kelurahan, seperti ketersediaan jaringan internet stabil dan perangkat komputer memadai, harus menjadi prioritas. Dukungan ini sangat krusial, terutama di wilayah dengan akses teknologi yang masih terbatas, agar tidak terjadi kesenjangan dalam pelaksanaan sistem.

b. Bagi Pendamping Sosial dan Operator DTSEN

1. Verifikasi lapangan harus dilakukan secara teliti dan menyeluruh, terutama pada aspek-aspek krusial seperti kondisi kesehatan, kelayakan tempat tinggal, atau keberadaan pendamping dalam rumah tangga. Ketepatan data pada tahap ini sangat menentukan keadilan distribusi bantuan.
2. Pemanfaatan fitur sistem seperti penanda otomatis, notifikasi perubahan, atau pembaruan real time perlu dimaksimalkan. Dengan memanfaatkan seluruh kapasitas teknis DTSEN, sistem dapat merespons dinamika sosial masyarakat secara lebih cepat dan akurat.
3. Peran aktif pendamping sosial dalam membantu lansia mengurus dokumen kependudukan patut ditingkatkan. Sebab, kelengkapan identitas bukan sekadar formalitas, melainkan syarat teknis utama agar data lansia dapat diperbarui dan divalidasi dalam sistem.

c. Bagi Masyarakat dan Lansia

1. Sosialisasi berkelanjutan mengenai pentingnya memperbarui dokumen kependudukan perlu diperluas melalui forum RT/RW, posyandu lansia, atau kegiatan keagamaan agar masyarakat memahami kaitan langsung antara kelengkapan administrasi dan akses terhadap layanan publik.
2. Dukungan keluarga atau relawan dalam proses pendataan sangat berarti, terutama bagi lansia yang mengalami keterbatasan fisik, kognitif, atau akses informasi. Kehadiran pendamping dapat membantu memastikan bahwa data yang dilaporkan akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya.

d. Bagi Peneliti di Masa Mendatang

1. Studi komparatif antarwilayah misalnya antara kota dan desa dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai tantangan spesifik yang dihadapi DTSEN dalam berbagai konteks sosial dan infrastruktur. Temuan semacam ini sangat berharga dalam merancang kebijakan yang responsif terhadap keragaman lokal.
2. Pendekatan kuantitatif layak dikembangkan untuk mengukur secara objektif pengaruh DTSEN terhadap penurunan error targeting, seperti duplikasi penerima atau penyaluran ke pihak tidak layak. Data empiris semacam ini dapat memperkuat dasar pengambilan keputusan kebijakan.
3. Kajian lebih mendalam mengenai hambatan digitalisasi termasuk tingkat literasi digital masyarakat, kesiapan sumber daya manusia, dan kesenjangan infrastruktur perlu dilakukan. Hasilnya dapat menjadi panduan dalam merancang solusi yang inklusif, berkelanjutan, dan benar-benar menyentuh kebutuhan di tingkat akar rumput.

Dengan penerapan rekomendasi rekomendasi ini secara sinergis, DTSEN berpotensi tidak hanya menjadi sistem administrative yang efisien, tetapi juga instrumen keadilan sosial

yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat rentan khususnya para lansia yang memerlukan perlindungan dan dukungan berkelanjutan

G. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan artikel ilmiah ini.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Bappenas, dan Badan Pusat Statistik atas penyediaan data serta panduan yang sangat membantu dalam memahami implementasi DTSEN di lapangan. Penghargaan juga diberikan kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kantor Kelurahan Rorotan yang telah memberikan izin serta memfasilitasi proses penelitian, termasuk kegiatan observasi dan wawancara.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada para pendamping sosial, petugas kelurahan, serta informan yang bersedia meluangkan waktu memberikan informasi mendalam mengenai pelaksanaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di wilayah mereka.

Tak lupa, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada dosen pembimbing, Bapak Romie Mesra, S.Pd., M.Pd., serta para rekan akademik di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka yang telah memberikan bimbingan, saran ilmiah, dan dukungan moral selama penelitian dan penulisan artikel ini berlangsung.

Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan, khususnya dalam kajian sosiologi kebijakan publik dan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia.

H. Daftar Pustaka

- Agustini, Grashinta, A., Putra, S., Sukarman, Guampe, F. A., Akbar, J. S., Lubis, M. A., Maryati, I., Ririnisahawaitun, Mesra, R., Sari, M. N., Tuerah, P. R., Rahmadhani, M. V., Rulanggi, R., (2023) "Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)", PT. Mifandi Mandiri Digital.
- Alkire, S., & Foster, J. (2011). *Counting and multidimensional poverty measurement*. Journal of Public Economics, 95(7–8), 476–487. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Penduduk Lanjut Usia Indonesia 2023. Jakarta: BPS RI.
- Bappenas. (2022). Integrasi data kependudukan dan sosial-ekonomi untuk perbaikan penargetan program perlindungan sosial di Indonesia (Policy Brief No. 04/2022). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Bappenas. (2023). Integrasi Data Sosial Ekonomi dalam DTSEN. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications
- Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. (2024). Laporan Implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional di Jakarta Utara. Jakarta: Dinsos DKI
- Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. (2024). Laporan Pendataan Lansia Miskin di Kelurahan Rorotan. Jakarta: Pemprov DKI Jakarta.

- Grindle, M. S. (1997). *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Handayani, S., Kusuma, R., & Wibowo, D. (2022). Integrasi Data Kemiskinan dan Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 10(2), 115–130.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). Digitalisasi data bantuan sosial: Upaya mengurangi intervensi nonteknis dalam penetapan penerima bantuan. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2024). Panduan Implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Jakarta: Kemensos RI.
- Kooiman, J. (2003). *Governing as Governance*. London: SAGE Publications
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. New York: Free Press.
- Prabowo, H., & Setiawan, I. (2021). Evaluasi Akurasi DTKS dalam Penyaluran Bantuan Sosial. *Social Welfare Review*, 5(1), 32–47.
- Prabowo, H., & Setiawan, I. (2021). Ketepatan data sosial ekonomi sebagai kunci keberhasilan program bantuan sosial. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 12(2), 145–159
- Rahmawati, D. (2023). Implementasi DTSEN dan Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial di Daerah Percontohan. *Indonesian Journal of Social Policy*, 8(1), 45–62.
- SMERU Research Institute. (2021). *Strengthening social protection targeting through integrated data systems: Evidence from Indonesia*. SMERU Research Institute
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Suryani, R., & Pratama, N. (2022). Ketepatan Data Penerima Bantuan Sosial di Era Digital: Tantangan dan Inovasi Kebijakan. *Jurnal Administrasi Sosial*, 7(2), 144–160.
- Susanto, A. (2021). Reformasi Data Sosial dan Tantangan Integrasi Kebijakan. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 6(3), 201–218.
- Suparlan, P. (2020). *Kemiskinan dan Kebutuhan Dasar Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- World Bank. (2020). Digitalisasi data sosial: Mengurangi kesalahan sasaran dalam bantuan sosial. Washington, DC: World Bank.